

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup, pendidikan dan kesehatan negara Indonesia termasuk kedalam negara berkembang yang masih dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi. Kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya motivasi, dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) mengakibatkan Indonesia masuk kedalam 100 negara miskin di urutan ke-73. Seringkali kemiskinan dipandang hanya sebagai masalah rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal sebenarnya kemiskinan adalah gejala yang lebih kompleks, termasuk di Indonesia. Negara ini menghadapi berbagai masalah, di antaranya adalah di sektor sosial ekonomi, khususnya terkait kemiskinan. Untuk mengurangi angka pengangguran tersebut pemerintah mendorong kemampuan kewirausahaan untuk menyerap potensi ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada september 2022 mencapai 26,36 juta orang. Dibandingkan maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 26,16 juta orang. Maret 2023 menurun 0,21 persen poin terhadap september 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam UUD tahun 1945 pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam JDIH Kemenkeu dijelaskan maksud dari fakir miskin dan anak terlantar disini pemerintah pusat dan daerah melaksanakan berbagai program seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar bagi warga negara yang miskin dan tidak mampu. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah dapat menetapkan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan ukuran yang paling wajar menurut kondisi daerahnya. Dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut pemerintah telah membuat program bantuan sosial. Bantuan sosial di tujukan agar seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dapat tetap hidup secara layak (Rahman et al., 2020). Salah satu bantuan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah hingga saat ini sebagai salah satu cara untuk meminimalisir kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Seperti yang tertulis dalam UU No.11 tahun 2009 penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Upaya PKH membangun system perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin sebagai upaya percepatan dalam mengurangi rantai kemiskinan. Dalam Permensos pasal 1 nomor 10 tahun 2018, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Salah satu contoh nyata penerima Program Keluarga harapan ini adalah Kecamatan Padang Hulu. Berdasarkan hasil observasi awal kecamatan ini memiliki luas wilayah 8.511 ha dengan jumlah penduduk 33 588 jiwa pada kenyataannya masih tergolong masyarakat menengah kebawah. Namun, sebagai kelurahan yang terus berkembang kelurahan ini tentunya masih memiliki permasalahan-permasalahan pada berbagai bidang salah satunya adalah kemiskinan. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tempat tinggal mereka yang sederhana dan tingkat pendidikan anak yang rata-rata. Melihat kenyataan tersebut masyarakat kelurahan sri padang kemudian di data sebagai calon penerima program keluarga harapan (PKH) yang akan digulirkan oleh pemerintah sehingga masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat miskin berhak mendapatkan program keluarga harapan (PKH). Adapun jumlah rumah tangga yang tercatat di kelurahan sri padang yaitu sebanyak 7.638 KK dan jumlah penerima PKH sejumlah 1.018 KK.

PKH membutuhkan pendamping karena alasan berikut ini: a) sebagian besar peserta PKH mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan haknya sebagai peserta PKH maupun hak lainnya terkait dengan program-program komplementaritas, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, b) pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas-tugas PPKH pusat/daerah dalam melakukan identifikasi dan melaporkan segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PKH, serta untuk melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaiannya dalam waktu cepat (Buku Pedoman Pendamping Keliling PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017: 6).

Dalam program keluarga harapan (PKH) salah satu yang menjadi ujung tombak keberhasilan dalam program ini adalah adanya pekerja sosial yang berperan sebagai pendamping PKH. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memainkan peran krusial dalam mendukung dan memfasilitasi penerima manfaat agar dapat memanfaatkan bantuan secara optimal. Untuk memastikan keberhasilan program, pendamping diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang program dan kebijakan yang berlaku serta keterampilan interpersonal yang kuat. Pendamping harus mampu berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang saling percaya dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta menangani masalah dengan empati.

Pendamping PKH yang kompeten tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, tetapi juga menunjukkan keyakinan diri (*self-efficacy*) yang tinggi dalam menjalankan peran mereka secara efektif. Dalam konteks ini, penguatan *self-efficacy* menjadi krusial, karena keyakinan diri yang tinggi dapat meningkatkan keberhasilan individu dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Jatisunda (2017) yang menyebutkan bahwa *self-efficacy* adalah penilaian seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam melaksanakan perilaku tertentu.

Self-efficacy dapat diartikan sebagai keyakinan atau self diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melaksanakan suatu tugas, dan mencapai tujuan tertentu untuk mencapai kecakapan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa *self-efficacy* berperan penting dalam menentukan seberapa efektif seseorang dapat mengorganisir dan menyelesaikan

tugas-tugasnya, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh King (dalam Zahirah,S., dkk., 2024) yang menjelaskan bahwa *self efficacy* merupakan bentuk keyakinan seseorang dalam menguasai sesuatu hal dan menghasilkan hal positif. *Self-efficacy* berperan penting dalam menentukan seberapa efektif seorang pendamping dapat menyelesaikan tugasnya, berinteraksi dengan penerima manfaat, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam proses pendampingan. Dalam hal ini, Damri, Engkizar, dan Anwar Fuady (2017) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa keyakinan dalam *self efficacy* tidak hanya mempengaruhi penilaian individu terhadap kemampuannya, tetapi juga memengaruhi cara dan tindakan yang dipilih oleh individu. Ini mencakup seberapa banyak usaha yang akan dilakukan, berapa lama individu akan bertahan menghadapi rintangan dan kegagalan, serta seberapa kuat ketahanan individu dalam menghadapi kesedihan dan kesulitan. Dengan kata lain, keyakinan diri berperan penting dalam menentukan seberapa jelas dan efektif individu dapat berpikir dan mencari solusi atas berbagai permasalahan hidup, berapa banyak tekanan dan kegundahan berdasarkan pengalaman individu dalam meniru atau copying lingkungan mereka, dan seberapa tinggi pemenuhan yang berhasil terwujud.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa tingkat *self-efficacy* di kalangan pendamping PKH di kecamatan padang hulu tidak selalu stabil. Meskipun banyak pendamping merasa yakin dalam menjalankan tugas-tugas rutin seperti kunjungan lapangan, memberikan pendampingan kepada KPM, berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, mampu untuk menghadapi situasi baru, beradaptasi dengan perubahan

kebijakan, menyelesaikan konflik, dan mengelola beban kerja yang berat. Namun, beberapa keyakinan pendamping kadang tidak konsisten ketika dihadapkan pada tantangan yang berkelanjutan atau berlangsung lama, seperti menangani permasalahan KPM yang kompleks, menghadapi perubahan kebijakan yang mendadak, atau menjalankan tugas baru yang berada di luar pengalaman sebelumnya.

Ketidakstabilan dalam keyakinan diri ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang memengaruhi *self-efficacy* pendamping PKH, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak biasa atau di luar rutinitas mereka. Ketika *self-efficacy* rendah atau buruk, kemampuan pendamping untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang muncul dalam proses pendampingan bisa menurun. Hal ini berisiko menghambat pencapaian tujuan utama PKH, yaitu memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika pendamping tidak mampu menjalankan peran mereka dengan keyakinan dan kompetensi yang tinggi, efektivitas program PKH secara keseluruhan bisa terganggu, dan dampak positif yang diharapkan dari program ini mungkin tidak akan tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul **“Analisis *Self Efficacy* Pada Pendamping PKH Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.”**

1.2 Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis *self-efficacy* pada pendamping PKH di kecamatan padang hulu dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana *self-efficacy* pada pendamping PKH di kecamatan padang hulu Kota Tebing Tinggi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *self-efficacy* pada pendamping PKH di kecamatan padang hulu Kota Tebing Tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana *self-efficacy* pendamping PKH di kecamatan padang hulu memengaruhi cara mereka menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan mereka.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Pendamping PKH: Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pendamping PKH mengenai pentingnya *self-efficacy* dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada penguatan *self-efficacy*, sehingga pendamping dapat lebih yakin dan efektif dalam mendukung Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 2) Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana *self-efficacy* pendamping berperan dalam kualitas interaksi dan dukungan yang diberikan kepada KPM. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi intervensi yang berfokus pada penguatan *self-efficacy* pendamping, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan KPM dalam program PKH.
- 3) Pemerintah Daerah: Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan *self-efficacy* pendamping PKH. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi *self-efficacy*, pemerintah dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat keyakinan diri pendamping, sehingga memastikan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).